# BAB IV

# KEBERHASILAN AMERIKA SERIKAT DALAM KEBIJAKAN TVPRA MENGGUNAKAN PRINSIP 3P

Memerangi perdagangan manusia bukan merupakan pekerjaan yang mudah, namun Amerika Serikat sudah memulai ini sejak tahun 2000 di era pemerintahan presiden Bill Clinton dengan disahkannya kebijakan TVPA. Kemudian dilanjutkan oleh presiden George Bush, Jr dengan amandemen TVPRA pada tahun 2003 dan 2006 untuk melindungi korban perdagangan manusia. Setelah era presiden George Bush, Jr kebijakan TVPRA dilanjutkan oleh presiden Barack Obama dan mengalami amandemen kembali sebanyak satu kali yaitu pada tahun 2013.

Pada bab ini penulis ingin menjelaskan tentang keberhasilan pemerintah Amerika Serikat dalam memerangi predagangan manusia melalui prinsip 3P dan tentu dengan memaksimalkan kebijakan TVPRA di setiap pemerintahan yang berkuasa.

Bagaimana prinsip prevention, prosecution, dan punishment ini bisa benar-benar efektif dalam memerangi perdagangan manusia. Baik dalam melindungi korban perdagangan manusia maupun dalam menuntut dan menghukum pelaku dari perdagangan manusia. Hasilnya adalah amerika sukses dalam rentang tahun 2010-2016 menempati Tier 1 dalam laporan TIP Report yang dikeluarkan setiap tahunnya.

Laporan TIP Report menjelaskan tentang usaha suatu negara dalam memerangi perdagangan manusia dengan penilaian Tier 1, Tier 2, Tier 2 Watchlist, Tier 3. Dalam laporan TIP juga diberikan rekomendasi kepada setiap negara untuk meningkatkan usaha

mereka dalam memerangi perdagangan manusia yang sekarang menjadi perhatian dari negara-negara di dunia.

## A. Tingkatan Dalam Laporan TIP

1. *Tier* 1 (peringkat 1) : negara yang masuk kriteria peringkat satu adalah negara yang pemerintahannya memenuhi standar minimal kebijakan TVPRA.

Negara-negara yang tergabung dalam Tier 1 ini antara lain Armenia, Australia, Austria, Kepulauan Bahamas, Belgia, Kanada,Chili, Kolombia, Siprus, Republik Ceko, Denmark, Finlandia, Prancis, Georgia, Jerman, Islandia, Israel, Italia, Korea Selatan, Lithuania, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Philiphina, Polandia, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, Swiss, Taiwan, Inggris, dan Amerika Serikat.[1]

2. *Tier* 2 (peringkat 2) : negara yang masuk kriteria peringkat kedua adalah negara yang pemerintahannya tidak memenuhi standar minimal kebijakan TVPRA namun masih berusaha untuk memenuhi standar tersebut.

Negara-negara yang tergabung dalam Tier 2 ini antara lain Albania, Angola, Argentina, Aruba, Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Bhutan, Bosnia & Herzegovina, Botswana, Brazil, Brunei, Burkina Faso, Cambodia, Chad, Croatia, Curacao, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, Estonia, Ethiopia, Fiji, Greece, Guatemala, Guyana, Honduras, Hungary, India, Indonesia, Iraq, Jamaica, Japan, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Kosovo, Kyrgyzstan, Latvia, Lebanon, Lesotho, Liberia.[2]

3. *Tier* 2 *Watch List* (peringkat 2 dengan pengamatan) : negara yang masuk kriteria peringkat kedua dengan pengamatan adalah negara yang pemerintahannya tidak memenuhi standar minimal kebijakan TVPRA namun masih berusaha untuk memenuhi standar tersebut dan jumlah korban perdagangan manusia di negara

[1] PUBLICATION, U. D. (2016). Trafficking in Persons Report 2016. *Trafficking in Persons*.

[2] ibid

tersebut tergolong tinggi, adanya kegagalan negara tersebut dalam memberikan bukti dalam meningkatkan usaha untuk melawan praktik perdagangan manusia.

Negara-negara yang tergabung dalam Tier 2 Watch List antara lain Meksiko, Mikronesia, Maroko, Namibia, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Palau, Panama, Paraguay, Peru, Romania, Sierra Leone, Singapura, Afrika Selatan, Tajikistan, Timor Leste.[3]

4. *Tier* 3 (peringkat 3) : negara yang masuk kriteria peringkat ketiga adalah negara yang pemerintahannya tidak memenuhi standar minimum kebijakan TVPRA dan tidak melakukan usaha sama sekali untuk memenuhi standar.

Negara-negara yang tergabung dalam Tier 3 antara lain Aljazair, Belarusia, Belize, Burma, Burundi, Republik Afrika Tengah, Iran, Haiti[4]

## B. Prinsip 3P Dalam Memerangi Perdagangan Manusia

Amerika Serikat merupakan sumber, tempat transit, dan destinasi bagi laki-laki, perempuan, anak-anak, dan transgender baik warga negara Amerika Serikat maupun warga negara lain yang menjadi korban perdagangan seks dan pekerja paksa. Perdagangan manusia terjadi di industri resmi maupun yang yang ilegal, termasuk jasa seks komersial, pelayanan jasa, pertanian, perikanan, manufaktur, petugas kebersihan, buruh kontruksi, karyawan restoran, dan yang lainnya.[5]

Individu yang memasuki wilayah Amerika Serikat tanpa status yang wajar dapat diindikasikan mereka merupakan korban perdagangan manusia. Petugas pemerintahan, pelaku bisnis, dan NGO telah menyampaikan permasalahan tentang resiko perdagangan manusia dalam rantai permintaan global, termasuk kontrak kerja mereka yang murah. Korban

[3] ibid
[4] ibid
[5] *US Department of State*. (2016, June 6). Dipetik April 2, 2017, dari US Department of State Website: https://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/countries/2016/258888.htm

perdagangan manusia berasal dari seluruh dunia namun ada 3 negara terbesar dalam jumlah korban perdagangan manusia yaitu Meksiko, Amerika Serikat, dan Filipina pada tahun 2015.[6]

Populasi yang rentan menjadi korban perdagangan manusia di Amerika Serikat meliputi anak-anak yang terlilit masalah ekonomi dan yang terkena masalah peradilan, tunawisma, suku indian dan suku alaska, dan buruh migran. NGO mencatat ada kenaikan kasus korban perdagangan manusia dengan disabilitas, kasus perdagangan manusia yang menggunakan obat-obatan terlarang, dan kasus tentang perdagangan manusia yang menyeret korbannya ke bisnis prostitusi.[7]

Pemerintah Amerika Serikat sudah memenuhi kriteria minimal dalam memerangi perdagangan manusia. Pemerintah negara bagian melanjutkan untuk menginvestigasi dan menuntut kedua bentuk kasus perdagangan manusia baik perdagangan seks dan buruh paksa. Dalam tiga tahun berturut-turut, Amerika Serikat telah menyediakan layanan yang luas dan khusus untuk korban perdagangan manusia dan meningkatkan dana untuk meningkatkan kualitas layanan ini.[8]

Amerika Serikat melanjutka untuk menyediakan beragam tipe bantuan imigrasi untuk korban perdagangan manusia dari negara lain, termasuk jalan untuk mengurus T-Visa. Otoritas negara bagian meningkatkan izin bagi korban perdagangan manusia untuk tinggal sementara di Amerika Serikat untuk keperluan investigasi pelaku perdagangan manusia dan memberikan *certification letter* kepada para korban perdagangan manusia.

Pemerintah Amerika Serikat meningkatkan jangkauan perjanjian dengan korban perdagangan manusia yang selamat untuk meningkatkan pelatihan, program, dan kebijakan dalam perdagangan manusia. Pemerintah mengambil langkah untuk memperbaiki perlindungan bagi pekerja lokal menggunakan diplomat negara lain di Amerika Serikat maupun diplomat Amerika Serikat di negara lain. Usaha pencegahan dilakukan untuk

[6] ibid
[7] PUBLICATION, U. D. (2015). Trafficking in Persons Report 2015. *Trafficking in Persons*.
[8] ibid

meningkatkan kesadaran tentang perdagangan manusia dan melanjutkan pendanaan bagi NGO untuk mengoperasikan *national hotline* bagi pada korban perdagangan manusia yang ingin melapor.

Pada bagian ini akan dijelaskan bagaimana prinsip 3P dapat secara efektif dalam memerangi perdagangan manusia di Amerika Serikat

**1. Prosecution**

Banyak dari negara di dunia sudah meratifikasi protokol Palermo, yang mengharuskan untuk membuat larangan dan menghukum pelaku perdagangan manusia. Banyak dari negara ini telah diberlakukan secara memadai aturan untuk menghukum para pelaku perdagangan manusia sesuai dengan protokol Palermo.[9]

Meskipun sebanyak 62 negara belum mencapai indikator yang ditetapkan dalam memberantas perdagangan manusia, perbandingan angka penuntutan dan hukuman terhadap pelaku perdagangan manusia di Amerika Serikat meningkat tajam dalam waktu 3 tahun. Dari 5,212 penuntutan dan 2983 hukuman terhadap pelaku perdagangan manusia di tahun 2008 menjadi 6,017 penuntutan dan 3,619 hukuman terhadap pelaku perdagangan manusia di tahun 2010.[10]

Pemerintah Amerika Serikat melanjutkan untuk melaporkan hasil dari usaha memerangi perdagangan manusia. TVPA 2000 yang di amandemen melarang segala bentuk perdagangan manusia. Hukum Amerika Serikat juga melarang konspirasi dan percobaan

[9] *State Gov*. (2011, June 1). Dipetik March 29, 2016, dari State Gov Website: https://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2011/166772.htm

[10] ibid

untuk melanggar aturan ini, sama dengan menghalangi penegakan aturan atas perdagangan manusia dan mengambil keuntungan dari kebijakan ini.[11]

Penuntutan perdagangan seksual yang melibatkan anak-anak tidak memerlukan bukti penggunaan paksaan, penipuan, dan kekerasan. Sebagai tambahan ketetapan pidana penipuan dalam kontrak tenaga kerja asing melarang penggunaan penipuan untuk merekrut pekerja yang dilakukan di Amerika Serikat atau dimanapun dalam kontrak pemerintah Amerika Serikat, properti Amerika Serikat, atau militer Amerika Serikat.

Hukuman yang ditentukan di bawah undang-undang ini cukup ketat dan sepadan dengan hukuman yang diberikan untuk pelanggaran serius lainnya, hukuman ini dapat mencakup penjara seumur hidup.[12] Kongres Amerika Serikat telah meloloskan beberapa tagihan selama melaporkan periode yang menunjukan perdagangan manusia.[13]

Pada bulan Mei 2015, *Justice for Victims of Trafficking Act* (JVTA) menjadi sebuah peraturan hukum, aturan ini memperbolehkan korban dari perdagangan manusia untuk ikut dalam merumuskan kebijakan negara bagian dalam anti perdagangan manusia.[14] Aturan ini menyediakan insentif bagi negara untuk menetapkan hukum untuk mencegah penuntutan anak-anak yang menjadi korban perdagangan manusia namun dijadikan subjek atau pelaku perdagangan manusia dan mengamandemen definisi negara bagian dalam kekerasan anak dan mencegah anak-anak termasuk dalam perdagangan manusia.

JVTA menyediakan tambahan dasar pada kewajiban pelaku kriminal perdagangan manusia bagi mereka yang meminta dan menyuruh korban perdagangan manusia untuk melakukan tindakan seks komersial dan menciptakan pelarangan baru yang melarang iklan

---

[11] *US Department of State*, Loccit
[12] ibid
[13] ibid
[14] ibid

aktivitas perdagangan seks.[15] Peraturan ini juga mengklarifikasi bahwa pelaku kasus perdagangan seksual pada anak untuk tidak dapat lagi menggunakan klaim ketidaktahuan tentang usia korban sebagai pertahanan.

Pada bulan Februari 2016, presiden Barack Obama mengadopsi pearturan *Megan's law*, peraturan ini mengatur untuk mencegah eksploitasi anak dan kejahatan seksual lainnya melalui pemberitahuan lanjutan dari larangan wisata seksual. Badan yang berwenang untuk membawahi aturan ini Department of Homeland Security (DHS) dan Department of Justice (DOJ).[16] Kedua badan ini memiliki tugas untuk menginformasikan pemerintah negara lain ketika mendata pelaku pelanggaran seks sedang mengunjungi negara mereka, dan menerima informasi ketika mereka datang ke Amerika Serikat dari luar negeri.

DOJ, DHS, dan *Department of State* (DOS) merupakan badan investigasi yang utama untuk para pelaku kejahatan perdagangan manusia. Pada negara bagian badan yang mengurus tentang pelaku perdagangan manusia adalah DOJ. Pada bulan Desember 2015, DOJ, DHS, dan *Department of Labor* (DOL) membentuk *six new Anti-Trafficking Coordination Team* (ACTeam) enam badan koordinasi baru anti perdagangan manusia di kota besar.[17] Ini merupakan ekspansi fase kedua untuk meningkatkan secara signifikan penuntutan dan hukuman bagi pelaku perdagangan manusia dibandingkan dengan daerah yang non-ACTeam.[18]

Fase kedua dari ACTeams juga melebarkan bukti pelayanan terhadap korban perdagangan manusia. DOJ menambah pendanaan 16 *Enhanced Collaborative Model* (ECM) satuan tugas anti perdagangan manusia, yang terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah negara

[15] ibid
[16] ibid
[17] ibid
[18] ibid

bagian, penegak hukum, pelayanan jasa terhadap korban perdagangan manusia, dan partner lainnya.[19]

NGO memuji satuan tugas ECM untuk penyedia jasa bagi korban perdagangan manusia dan merekomendasikan semua satuan tugas negara bagian yang telah didanai untuk melakukan hal yang sama.

**2. Protection**

Pemerintah Amerika Serikat melanjutkan usahanya untuk meningkatkan perlindungan korban perdagangan manusia. Pemerintah memberikan izin tinggal lebih banyak kepada korban perdagangan manusia pertama kali dalam tiga tahun terakhir dan meningkatkan dana untuk membantu pelayanan terhadap korban perdagangan manusia.[20] Pemerintah juga berkolaborasi dengan NGO, penyedia layanan terhadap korban perdagangan manusia lainnya, dan korban perdagangan manusia yang selamat untuk menambah respon kepada identifikasi korban perdagangan manusia dan arahan layanan untuk korban perdagangan manusia.[21]

Dalam empat tahun berturut-turut , pemerintah Amerika Serikat mensertifikasi dan menyediakan layanan untuk korban perdagangan manusia yang jumlahnya signifikan.[22] NGO melaporkan pemerintah pusat dan otoritas lokal melanjutkan untuk menahan dan menuntut koban perdagangan manusia, termasuk yang masih berusia dibawah 18 tahun, untuk diinterogasi mengapa mereka bisa menjadi objek dari perdagangan manusia.

Negara bagian mendanai bantuan kepada korban perdagangan manusia meliputi manajemen kasus dan arahan untuk rumah sakit, psikolog dan perawatan kekerasan, tempat tinggal, layanan penerjemah dan intepretasi, imigrasi dan bantuan hukum, pelatihahan karyawan, dan bantuan transportasi. Department Health and Human Services (HHS)

[19] ibid
[20] ibid
[21] ibid
[22] ibid

memberikan setrifikasi dan surat kelayakan bagi para korban perdagangan manusia dari negara lain untuk dapat mengakses pelayanan dan manfaat seperti para pengungsi yang tinggal di Amerika Serikat.[23]

Surat sertifikasi memperbolehkan korban perdagangan manusia dewasa yang bukan berasal dari Amerika Serikat untuk menerima layanan dari pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian untuk menerima perlakuan seperti pengungsi. Mereka berhat mendapat status T di visa mereka yang berarti mereka transit di wilayah Amerika Serikat untuk beberapa waktu sampai dengan mendapat status dari kasus hukum mereka.[24]

HHS melaporkan di tahun 2015 ada 623 *certification letters* yang diberikan kepada korban perdagangan manusia dewasa yang bukan berasal dari Amerika Serikat dan 240 *eligibility letters* yang diberikan kepada anak-anak korban perdagangan manusia yang bukan berasal dari Amerika Serikat.[25] Data ini ada peningkatan dibandingkan dengan dua tahun kebelakang , ketika HHS memberikan 530 *certification letters* dan 219 *eligibility letters* pada tahun 2014, dan 406 *certification letters* dan 114 *eligibility letters* pada tahun 2013.[26]

Dari seluruh korban yang disertifikasi pada tahun 2015 merupakan korban pekerja paksa, yang setengahnya merupakan perempuan. Lebih dari tujuh puluh delapan persen merupakan korban perdagangan manusia yang masih anak-anak yang mendapatkan *eligibility letters* merupakan pekerja paksa, naik sekitar enak puluh enam persen dibandingkan dengan tahun 2014. HHS menghadiahkan sekitar $7,5 juta pada tahun 2015 kepada 3 NGO karena visi mereka dalam memberikan pelayanan kepada korban perdagangan manusia yang bukan berasal dari Amerika Serikat melalui jaringan mereka yang mereka miliki, hadiah ini naik sedikit dibandingkan dengan tahun 2014 yang hanya $7,4 juta.[27]

---

[23] ibid
[24] ibid
[25] ibid
[26] ibid
[27] ibid

DHS memberikan status *T nonimmigrant* kepada 610 korban perdagangan manusia dan 693 keluarga korban perdagangan manusia, ada penurunan dibandingkan dengan data tahun 2014 yaitu 613 korban perdagangan manusia dan 788 diberikan kepada keluarga korban perdagangan manusia.[28]

Pada tahun 2015 DOS memiliki program untuk mempertemukan kembali 244 keluarga korban perdagangan manusia dengan korban perdagangan manusia di Amerika Serikat.[29] Program ini menyediakan dua korban yang selamat untuk dikembalikan ke negara asal mereka. NGO melanjutkan laporan mereka bahwa penegakan hukum di pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian gagal melindungi anak-anak dalam perdagangan manusia. NGO juga melaporkan beberapa badan pemerintahan seringkali menempatkan anak-anak di tempat yang tidak layak demi mendapatkan mengamankan testimoni mereka, perlakuan hasilnya mengurangi kepercayaan dalam penegakan hukum dan menimbulkan trauma pada anak-anak korban perdagangan manusia.

**3. Prevention**

Pemerintah Amerika Serikat membuat progress usaha dalam memerangi perdagangan manusia. Pemerintah menyediakan kesempatan kepada semua pelaku yang terlibat dalam perang terhadap perdagangan manusia untuk memberikan masukan dan pemerintah tetap transparan dengan semua tindakan yang dilakukan. Badan-badan dari negara bagian melakukan berbagai kesadaran dan pelatihan aktifitas untuk semua anggota mereka, termasuk aparat penegak hukum, para ahli, dan anggota mereka yang berada di lapangan.[30]

Pemerintah melanjutkan ukuran jangkauan di masyarakat untuk mengetahui sebab dan akibat dari perdagangan manusia dan melanjutkan untuk terus mengidentifikasi korban diantara populasi yang rentan untuk direkrut menjadi korban perdagangan manusia. HHS

[28] ibid
[29] ibid
[30] ibid

melanjutkan mendanai NGO untuk mengoperasikan *National Human Trafficking Resource Center* (NHTRC), sebuah layanan yang menerima kurang lebih 34.000 panggilan di tahun 2015 dari seluruh wilayah Amerika Serikat.[31] Kedutaan besar Amerika Serikat dan konuslat di seluruh dunia mengiklankan pamflet "*Know Your Right*" yang di dalamnya termasuk nomor telfon yang bisa dihubungi jika korban perdagangan manusia ingin melapor.[32]

Pemerintah mengambil tambahan langkah untuk melindungi pekerja lokal dengan mengurangi peran pekerja asing untuk selama periode waktu tertentu. Department of Education melaksanakan fungsinya untuk mempromosikan anti perdagangan manusia di kurikulum semua negara bagian di Amerika Serikat. Peran ini penting dilakukan agar anak-anak dapat sadar betapa bahayanya perdagangan manusia sekarang yang sudah menjadi masalah seluruh negara di dunia.[33]

Pada bab ini dapat disimpulkan bahwa usaha Amerika Serikat sejak presiden Barack Obama menjabat sebagai presiden sudah sangat banyak dalam memerangi perdagangan manusia. Seperti presiden Barack Obama memperbaiki pelayanan terhadap korban perdagangan manusia dan beberapa departemen di Amerika Serikat juga sudah sadar betapa bahayanya kejahatan perdagangan manusia ini.

[31] ibid
[32] ibid
[33] ibid

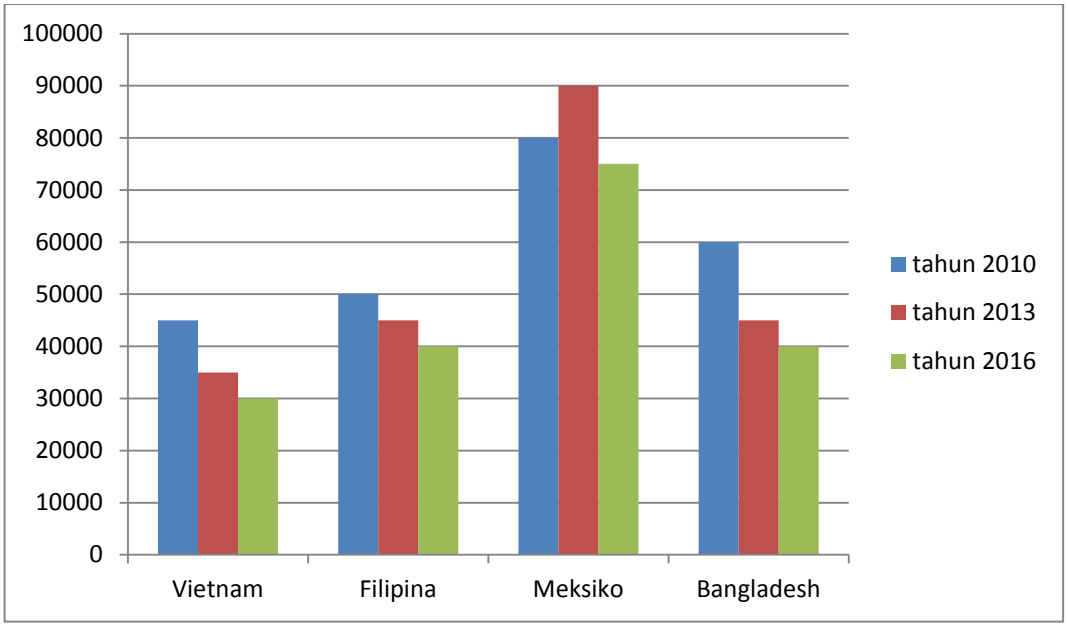


Grafik 4.1 menjelaskan tentang penurunan korban perdagangan manusia dari 4 negara yaitu Filipina, Vietnam, Meksiko, dan Bangladesh yang bersumber dari PUBLICATION, U. D. (2010-2016). [34]

Pada grafik 4.1 dijelaskan bahwa angka perdagangan manusia pada interval tahun 2010-2016 di Amerika Serikat yang diwakili oleh 4 negara yaitu Vietnam, Filipina, Meksiko, dan Bangladesh mengalami grafik penurunan dari tahun 2010, 2013, dan 2016 pada akhir pemerintahan Presiden Barack Obama.[35] Hal ini terjadi karena Amerika Serikat menerapkan 3P yaitu Prosecution, Protection, Prevention juga dapat dikatakan merupakan pondasi Amerika Serikat dalam memerangi perdagangan manusia baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kedutaan besar dan konsulat amerika di seluruh dunia juga terus menginformasikan bagaimana perdagangan manusia harus menjadi musuh kita bersama karena Amerika Serikat tidak dapat memberantas masalah perdagangan manusia hanya sendiri.

[34] PUBLICATION, U. D. (2010-2016). Trafficking in Persons Report 2010-2016. *Trafficking in Persons*.

[35] ibid